



Implementasi Bantuan Pembangunan Program Air dan Sanitasi USAID IUWASH PLUS di Indonesia Tahun 2021

Andi Muhammad Farid Ramadhan¹, M. Syaprin Zahidi²

¹²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

¹frd131299@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the USAID IUWASH PLUS 2021 water and sanitation program development assistance in Indonesia. Due to the clean water and sanitation problems in Indonesia, the United States government, through USAID, distributes aid in the form of grants. This research applies a qualitative research method with a case study approach. The collected data were analyzed using the concepts of foreign aid and aid effectiveness. The results of this study found that the authors linked the principles contained in the Paris Declaration such as the principle of ownership, the principle of local harmony, the principle of harmonization, the principle of management and the principle of shared responsibility. The USAID IUWASH PLUS program is effective in improving water and sanitation services in Indonesia, referring to the results published by USAID in the February 2022 Final Report.

Keywords: *Aid Effectiveness; Bappenas; Foreign Aid; IUWASH PLUS; USAID*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan dalam menganalisis implementasi bantuan pembangunan program air dan sanitasi USAID IUWASH PLUS 2021 di Indonesia. Dilatarbelakangi oleh permasalahan air bersih dan sanitasi di Indonesia membuat pemerintah Amerika Serikat melalui USAID menyalurkan bantuannya dalam bentuk hibah dana. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan konsep bantuan luar negeri dan efektivitas bantuan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penulis mengaitkan prinsip-prinsip yang ada di dalam *Paris Declaration* seperti prinsip kepemilikan, prinsip keselarasan lokal, prinsip harmonisasi, prinsip pengelolaan dan prinsip pertanggungjawaban bersama. Program USAID IUWASH PLUS efektif dalam meningkatkan layanan air dan sanitasi di Indonesia merujuk pada hasil yang dipublikasikan oleh USAID melalui *Final Report* bulan Februari 2022.

Kata Kunci: *Bantuan Luar Negeri; Bappenas; Efektivitas Bantuan; IUWASH PLUS; USAID*

Pendahuluan

Bantuan luar negeri pada awalnya diimplementasikan sejak terjadinya Perang Dunia II. Namun seiring berjalannya waktu, bantuan luar negeri saat ini tidak hanya yang berkaitan dengan dinamika politik internasional saja tetapi sudah merujuk pada tujuan pembangunan global/*Sustainable Development Goals* (SDGs) dan kegiatan kemanusiaan disaat suatu negara membutuhkan bantuan (Asongu, 2015). SDGs merupakan tujuan bagi negara donor dalam memberikan bantuan luar negeri dengan memprogramkan berbagai jenis bantuan kepada negara penerima. *United State Agency for International*

Development (USAID) merupakan badan bantuan luar negeri Amerika Serikat. Pada tahun 1961, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, J.F. Kennedy menandatangani *Foreign Assistance Act* (Undang-Undang Bantuan Luar Negeri) sehingga terbentuk USAID (USAID, 2022). USAID memprioritaskan bantuan kepada negara yang mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan negara yang sedang mengalami krisis ataupun konflik. Beberapa bidang bantuan yang disalurkan mulai dari ekonomi, pendidikan, bantuan kemanusiaan dan pengembangan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Amerika Serikat turut dalam misi kemanusiaan di negara-negara yang terlibat konflik untuk membantu umat manusia (Zahidi et al., 2016). Pemerintah Amerika Serikat melalui *United State Agency for International Development* (USAID) turut mendukung dalam pertumbuhan ekonomi terhadap negara mitranya melalui misi program bantuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu bantuan USAID yaitu dalam bidang air dan sanitasi kepada negara-negara mitra dalam meningkatkan, merencanakan dan memberikan layanan sumber daya air bersih dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan. Program ini juga sejalan dengan tujuan visi pemerintah Amerika Serikat dalam mendukung kebijakan luar negeri *U.S. Government Global Water Strategy* terkait krisis air global yang masih menjadi salah satu isu masalah yang dapat berdampak bagi kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan lingkungan masyarakat (U.S. Governnet, 2017).

Air bersih dan sanitasi yang layak berperan penting dalam pola kebersihan baik pada diri sendiri maupun lingkungan sosial. Akses pengelolaan sanitasi, air bersih dan kebersihan masuk kedalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ke-6. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan sanitasi sebagai akses dan penggunaan fasilitas serta pelayanan dalam pembuangan urin dan feses manusia dari toilet hingga ke pembuangan akhir. Kemampuan untuk mengelola air bersih dan sanitasi dapat menghindari dari paparan penyakit seperti diare dan pneumonia yang dimana penyakit-penyakit tersebut juga merupakan penyebab utama kematian anak dibawah usia 5 tahun (WHO, 2017). Permasalahan air bersih dan sanitasi juga dialami Indonesia karena disebabkan oleh buruknya pengelolaan air bersih. Indonesia merupakan negara kepulauan dimana pembangunan masih belum merata secara menyeluruh. Indonesia berada pada posisi ketiga memiliki sanitasi tidak layak berdasarkan data dari WHO pada tahun 2017 (Suryani, 2020). Di sisi lain, Amerika Serikat berada pada peringkat ke-36 di dunia dalam hal akses air bersih dan sanitasi pada tahun 2017 menurut *Human Rights Watch* (Klasing, 2020). Amerika Serikat memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia sehingga hal tersebut menjadi salah satu negara tujuan implementasi kebijakan luar negeri *U.S. Government Global Water Strategy*. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas yang menjadi perwakilan Indonesia dalam menjalin kerja sama dengan USAID diawali dengan penandatanganan *Individual Arrangement* (IA) pada tanggal 11 Mei 2016 yang mencantumkan tujuan dari program ini adalah untuk membantu upaya Indonesia dalam meningkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi yang lebih baik melalui program Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan Untuk Semua (IUWASH PLUS) tahun 2016-2021 (Kementerian Sekretariat Negara, 2016). Program ini juga menjadi salah satu upaya Indonesia untuk mencapai SDGs poin 6 mengenai Air Bersih dan Sanitasi Layak dengan bekerja sama oleh pemerintah Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan berbagai lembaga swasta lainnya.

Kebijakan luar negeri terdapat sebuah instrumen yakni bantuan luar negeri yang salah satunya bertujuan untuk pembangunan global serta kegiatan kemanusiaan disaat negara tersebut membutuhkan bantuan. *United State Agency for International Development* (USAID) merupakan lembaga bantuan asing yang mempunyai fokus pada pembangunan global. Bantuan luar negeri memiliki beberapa tujuan utama yakni untuk

melakukan hubungan diplomatik, bantuan kemanusiaan, perkembangan dan komersial. Pada umumnya, bantuan luar negeri diberikan kepada negara yang membutuhkan bantuan dan negara berkembang. Menurut K.J. Holsti yang dikutip oleh Larasati Caesar Utoro mendefinisikan bantuan luar negeri dapat kategorikan dalam merumuskan kebijakan hubungan internasional. Beberapa bentuk bantuan luar negeri seperti bantuan jasa, barang, dan hal-hal yang diterima oleh negara pendonor (Utoro, 2017). Terdapat beberapa tipe utama bantuan luar negeri, salah satunya hibah yang dalam hal ini dilakukan oleh USAID kepada Indonesia dalam program IUWASH PLUS.

Sebelum membahas lebih lanjut, penulis mengambil beberapa penelitian jurnal yang membahas efektivitas bantuan luar negeri sehingga mendapatkan kebaruan dari penelitian ini. Pada penelitian efektivitas bantuan pembangunan *Peace Corps* Amerika Serikat di Indonesia oleh Listia Khairunnisa yang membahas bantuan efektivitas bantuan *Peace Corps* dengan menggunakan konsep *Paris Declaration on aid Effectiveness* dan keberhasilan antara penerima bantuan. Selain *Peace Corps*, penelitian oleh Aliya Hamida terkait program bantuan *Solidarity Grants Atlantic* membahas dua belas indikator *Paris Declaration* dalam menilai bantuan yang diterima oleh Rumpun Nurani. Penelitian Edgar Haak dan Naohiro Nakamura yang berjudul *Perceptions of local community members towards foreign aid: A case study of Vava'u Tonga* menilai persepsi sosial terhadap dampak bantuan luar negeri dan penerapan bantuan tersebut yang diawasi oleh pemerintah (Haak & Nakamura, 2021). Beberapa jurnal diatas membahas tentang bagaimana bantuan luar negeri dapat dikatakan efektif dengan menggunakan konsep *Paris Declaration on aid Effectiveness*. Namun, penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan terhadap penelitian sebelumnya. Persamaan dari penelitian ini terdapat pada pengelolaan bantuan luar negeri dengan konsep *Paris Declaration on aid Effectiveness*. Sedangkan perbedaan terletak di studi kasus yang diangkat oleh penulis. Program bantuan IUWASH PLUS di Indonesia belum banyak diteliti oleh sebab itu menjadi ketertarikan penulis dalam membahas bantuan ini.

Maka dari itu, research gap dari penelitian ini akan membahas mengenai implementasi bantuan pembangunan program air dan sanitasi USAID IUWASH PLUS tahun 2021 di Indonesia dengan menggunakan konsep bantuan luar negeri dan efektifitas bantuan dengan merujuk pada lima prinsip-prinsip dasar *Paris Declaration on Aid Effectiveness*. Lebih dari pernyataan prinsip umum, Deklarasi Paris menjabarkan peta jalan yang praktis dan berorientasi pada tindakan untuk meningkatkan kualitas bantuan dan dampaknya terhadap pembangunan. Ini menempatkan serangkaian tindakan khusus untuk implementasi dan membangun kinerja indikator yang menilai kemajuan (OECD, 2005). Ini juga menyerukan sistem pemantauan internasional untuk memastikan bahwa donor dan penerima saling menjaga akuntabel – fitur yang unik di antara perjanjian internasional. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah melihat sejauh mana implementasi program IUWASH PLUS di Indonesia tahun 2021 sebagai upaya untuk mencapai target SDGs nomor 6 terkait dengan air bersih dan sanitasi.

Metode

Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini menjelaskan suatu isu yang sedang ataupun sudah terjadi berupa dengan pengumpulan, pemilihan serta generalisasi fakta atau data. Teknik analisa data yang dipakai oleh peneliti yakni kualitatif yang bertujuan untuk menunjukkan kualitas issue yang akan diformat dalam bentuk perkataan. Sehingga dalam melakukan penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengumpulkan data serta informasi tambahan yang relevan untuk dijadikan sebagai instrumen pendukung terhadap konsep yang dipakai. Peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan memakai teknik studi pustaka ataupun library research, yakni pengumpulan data berbentuk informasi-informasi melalui e-book, jurnal, buku laporan, artikel, berita online dan working paper terkait dengan judul penelitian ini. Data sekunder yang terkumpul dianalisis sesuai konsep bantuan luar negeri dan efektivitas bantuan *paris declaration*.

Hasil dan Pembahasan

Semakin meningkatnya kebutuhan manusia, Amerika Serikat kemudian mendirikan sebuah badan independen untuk memberikan bantuan dan fasilitas terhadap negara berkembang dan negara mitra yakni *United State Agency for International Development* (USAID) yang didirikan atas dasar *Foreign Assistance Act of 1961* berfungsi untuk menyalurkan berbagai bantuan sesuai dengan tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat (USAID, 2009). Beberapa bidang bantuan yang disalurkan mulai dari ekonomi, pendidikan, bantuan kemanusiaan dan pengembangan pembangunan berkelanjutan. USAID dengan Indonesia sudah menjalin hubungan sejak tahun 2004 (USAID, 2022). Melalui investasi berbasis hasil, USAID bermitra dengan berbagai pihak yang ada di Indonesia yang salah satunya yakni dalam bidang lingkungan hidup.

Indonesia merupakan negara penerima bantuan Amerika Serikat melalui USAID dalam program IUWASH PLUS pada bidang air bersih dan sanitasi. Program IUWASH PLUS dimulai pada tahun 2017 hingga 2021 ini menjadi salah satu bentuk mencapai tujuan SDGs di tahun 2030 dengan bekerja sama oleh pemerintah Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan berbagai lembaga swasta lainnya. Program ini dijalankan di delapan provinsi dan terbagi atas 35 daerah di Indonesia. Daerah ini khusus mencapai target program unggulan yakni meningkatkan kesempatan menikmati pelayanan sanitasi aman di 500.000 penduduk perkotaan dan meningkatkan akses pelayanan air minum yang lebih layak dan aman untuk 1,1 juta penduduk di perkotaan (NAWASIS, 2017). IUWASH PLUS memiliki beberapa komponen program untuk mendukung terjadinya kerja sama ini agar lebih efektif dan dapat menjangkau sasaran masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Komponen pertama yaitu meningkatkan air, sanitasi dan sikap hygiene rumah tangga. Hal ini menjadi bagian terpenting dalam program USAID IUWASH PLUS dalam mengatasi hambatan dan peningkatan akses WASH (water, Sanitation dan hygiene) di lingkup perkotaan masyarakat miskin. IUWASH dan Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dalam membangun kesadaran dan pengetahuan pentingnya masalah Air Bersih dan Sanitasi di lingkungan masyarakat dan rumah tangga (Suryani, 2020). Komponen ini menjadi hal penting program melalui peningkatan penyadaran masyarakat terlebih dahulu sebab IUWASH memulai programnya secara *down to up*, yang mulai dari masyarakat tingkat kesejahteraan rendah.

Komponen kedua yaitu memperkuat kinerja institusi dalam sektor air minum, sanitasi dan hygiene. IUWASH PLUS mengaplikasikan pendekatan berbasis permintaan dengan berdasar pada kinerja dan target yang jelas hingga akhir proyek semua tercapai. Institusi yang terlibat dalam proyek ini antara lain yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Untuk mewujudkan peningkatan akses air bersih, maka dibutuhkan sebanyak 30 PDAM/PERUMDA. Indeks kinerja PDAM perlu dilakukan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kinerja PDAM (Serniati, Parawangi, & Ma'ruf, 2021). Dalam meningkatkan kinerja kelembagaan PDAM, USAID IUWASH PLUS menerapkan berbagai intervensi seperti mendukung penyusunan rencana bisnis, mengembangkan rencana aksi guna mencapai B40, meninjau tarif, mendukung peningkatan penagihan serta laporan keuangan. Dalam bidang sanitasi, terdapat indeks sanitasi yang berguna untuk memantau kemajuan program, sebagai alat perencanaan dan sebagai alat advokasi untuk bermitra dengan mitra lokal (Indonesia & Water, 2017).

Komponen ketiga, IUWASH PLUS mempromosikan beberapa perubahan dalam mengatur pembiayaan lingkungan, seperti membangun kesadaran di dalam lembaga pemerintah terkait sesuai kebijakan yang telah diatur dan memantau aliran keuangan secara akuntabilitas. Menganalisis dan mengevaluasi segala bentuk implementasi pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkaitan dengan masalah air bersih dan sanitasi. Tahun 2021, pembangunan air dan sanitasi terhambat karena sebagian APBD dialokasikan dalam meningkatkan infrastuktur kebersihan dan kesehatan. Akan tetapi selama lima tahun, sebanyak 20% alokasi dana pembangunan air dan sanitasi telah diberikan di setiap daerah. Dalam mewujudkan penguatan pembiayaan WASH, perlu diperhatikan kebijakan pemerintah yang berlaku dan instansi/lembaga pemerintah terkait seperti PDAM. IUWASH PLUS telah membantu PDAM disetiap daerah untuk memfasilitasi akses pembiayaan proyek belanja modal. Secara garis besar, pembangunan infrastruktur air dan sanitasi diimplementasikan dengan membangun instalasi pengolahan air baru.

Komponen yang terakhir berfokus pada penangkapan, penyebaran, integrasi dari pelajaran yang telah dipelajari dan praktik terbaik untuk dikembangkan kebijakan nasionalnya sekaligus memperkuat koordinasi program WASH antar lembaga pemerintah nasional. Dalam kerjasamanya, USAID IUWASH PLUS melibatkan ahli kebijakan nasional untuk melakukan analisis terkait kebijakan, peraturan dan perumusan rekomendasi untuk perbaikan implementasi atau reformasi langkah-langkah dalam kemitraannya. Menghubungkan pemangku kepentingan guna memperkuat advokasi untuk perubahan kebijakan, advokasi untuk meningkatkan kesiapan kota/kabupaten kriteria juga dilakukan dalam komponen ini (Beritapers, 2021). Ada beberapa institusi pemerintah menjadi bagian dalam memperkuat bantuan pelayanan air dan sanitasi seperti Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian PPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah. Selain itu, ada lembaga nasional yang turut menyatukan program bantuan ini yaitu Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL), dimana berfungsi sebagai wadah atau forum koordinasi utama terhadap institusi pemerintah. Koordinasi yang dilakukan dapat turut membantu mencapai program yang telah dibentuk antara lain pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah (RPJMN) 2020 – 2024, membuka dialog terbuka tentang masalah air dan sanitasi, dan pengembangan mitra lokal untuk meningkatkan kapasitas jaringan pelayanan bantuan (DAI Global, 2021).

Berdasarkan hasil komponen program IUWASH PLUS, dapat dilihat bahwa USAID telah memberikan secara garis besar dalam berkomitmen permasalahan air dan sanitasi sekaligus mencapai tujuan pembangunan global. Tetapi ada beberapa faktor penghambat dalam mendukung program ini, seperti di Kabupaten Probolinggo. Faktor sosial lingkungan dan ekonomi menjadi penghambat dalam mengimplementasikan, sebab kondisi lingkungan yang tidak mendukung contohnya masyarakat yang tinggal di daerah dekat dengan sungai. Penggunaan sungai sebagai tempat BABS masih sulit untuk merubah kebiasaan tersebut. Oleh karena itu perlunya pendekatan sosial agar dapat merubah mindset seperti BABS dan penggunaan air sungai sebagai sumber utama (Sandy, 2020).

Maka dari itu, berikut penulis akan menguraikan beberapa implementasi bantuan luar negeri sesuai konsep *Paris Declaration on Aid Effectiveness* terhadap program IUWASH PLUS. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang juga ikut serta dalam memprakarsai pertemuan *Paris Declaration on Aid Effectiveness*. Pada tahun 2005, *Paris Declaration* merupakan awal dari bagaimana sebuah negara bagi penerima bantuan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dikategorikan efektif atau tidak efektif (*Organisation for Economic Co-operation and Development*, 2005). *Paris Declaration* mengemukakan lima prinsip dasar *Aid Effectiveness* yakni :

1. Prinsip Kepemilikan Kebijakan

Prinsip kepemilikan kebijakan yang mewajibkan negara penerima bantuan memiliki kebijakan dalam mengembangkan strateginya untuk mencapai target pembangunannya. Kepemilikan kebijakan negara menjadi indikator dalam melihat efektivitas program bantuan luar negeri untuk dapat mengatur aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, Kebijakan negara merupakan suatu hal terpenting dalam menjalankan tujuan negara dalam pembangunannya. Menerima bantuan luar negeri, negara akan membuat kebijakan dan strategi untuk mencapai kepentingan dan kebutuhannya.

Indonesia telah menetapkan kebijakannya dalam mengatasi permasalahan air bersih dan sanitasi yang diatur dalam Perpres RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menetapkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs sebagai komitmen pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (Peraturan Presiden RI, 2017). Dalam RPJMN 2020-2024, dapat dilihat bahwa Indonesia menargetkan untuk mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi. Hal ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa target yang telah dicantumkan dalam RPJMN dapat mewujudkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pembangunan berkelanjutan secara global.

Dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan/SDGs, terdapat tiga dokumen rencana program SDGs, yaitu Peta Jalan Nasional TPB, Rencana Aksi Nasional TPB (RAN-TPB) dan Rencana Aksi Daerah TPB (RAD-TPB). Namun berdasarkan Perpres No. 59 tahun 2017 Pasal 4, pemerintah menggunakan Peta Jalan Nasional TPB untuk program IUWASH PLUS karena memiliki pedoman alur yang memuat rencana dan kebijakan strategis untuk mencapai SDGs yang dimulai pada tahun 2017 hingga 2030 sesuai dengan rancangan pembangunan nasional. SDGs Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak merupakan salah satu proyek prioritas strategis karena hal ini dapat menyangkut beberapa masalah di lingkungan masyarakat maupun pembangunan. Menurut Peta Jalan SDGs Indonesia menuju 2030, strategi kebijakan masalah air bersih mengarah kepada peningkatan keamanan air bersih, sistem pengelolaan air bersih yang layak, dan pengelolaan pemerintahan dan kesadaran masyarakat. Sedangkan dalam bidang sanitasi, kebijakan mengarah pada strategi penguatan pemerintah dalam mengolah air limbah, pembuatan regulasi yang aman, dan pengembangan kesadaran berperilaku untuk tidak BABS.

2. Keselarasan Lokal

Prinsip keselarasan lokal yang mengharapkan negara penerima pemberi bantuan dan negara penerima bantuan berjalan sesuai kebijakan pembangunan. Pengelolaan bantuan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah tetapi lembaga lokal atau institusi lokal yang akan dilibatkan. Dalam prinsip keselarasan lokal, negara pendonor dan negara penerima bantuan menginginkan berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati. Negara pendonor mendukung strategi negara penerima bantuan dalam kerja sama strategi pembangunan negara penerima bantuan. Negara pendonor dan negara penerima bantuan bekerja sama untuk membangun kerangka kerja yang telah disepakati. Tujuannya yaitu dapat memperkuat dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan negara penerima bantuan dapat dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

USAID IUWASH PLUS bekerja sama dengan lembaga pemerintah nasional agar program bantuan pembangunan berjalan dengan baik. Lembaga pemerintah nasional terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan 35 pemerintah daerah (Pemda).

Bukti 1. Daftar Pemerintah Daerah (Pemda) Mitra				
Sumatera Utara	Jawa Barat / DKI Jakarta/Tangerang (WJDT)	Jawa Tengah	Jawa Timur	Sulawesi Selatan / Indonesia Timur (SSEI)
Kota Medan	DKI Jakarta	Kota Surakarta	kota surabaya	Kota Makassar
Kota Tebing Tinggi	Kab. Tangerang	Kab. Sukoharjo	Kab. Gresik	Kab. baru
Kota Sibolga	Kota Bekasi	Kota Salatiga	Kab. Sidoarjo	Kab. bantaeng
Kota Pematang Siantar	Kota Depok	Kab. Magelang	Kota Malang	Kab. Bulukumba
Kab. Deli Serdang	Kota Bogor	Kota Magelang	Kota Probolinggo	Kab. Maluku Tengah
	Kab. Karawang	Kab. Sragen	Kab. Probolinggo	Kota Ternate
	Kab. Bogor	Kab. Wonosobo	Kab. Lumajang	Kota Jayapura
			Kab. Malang	Kab. Jayapura

Gambar 1. Daftar Mitra Pemerintah Daerah (Pemda) dengan IUWASH PLUS Sumber (Final Report USAID IUWASH PLUS Tahun 2022)

Program bantuan air dan sanitasi diimplementasikan di 35 pemerintah daerah berdasarkan table di atas. Kemudian, Pemerintah daerah akan melakukan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai bentuk persetujuan antar USAID dan pemerintah daerah. Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) disetiap daerah sebagai menjadi pemangku kepentingan dalam memantau dan mengevaluasi program yang telah disepakati. Bappeda berperan penting dalam penyelarasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain itu, salah satu program IUWASH PLUS yaitu *Local Sustainability and Innovation Component* (LSIC) yang akan mendapatkan hibah sebesar \$1,5 dan \$1 juta bagi subkontrak (USAID, 2018). Kegiatan ini dibuat bagi partisipasi dan kerja sama non-pemerintah/swasta dalam mendukung capaian pembangunan berkelanjutan air bersih dan sanitasi di Indonesia. Terdapat dua mekanisme dalam menjalankan LSIC yaitu Pendanaan (hibah) dan Subkontrak. Pendanaan atau hibah akan diberikan berdasarkan proposal yang telah disepakati sesuai tujuan IUWASH PLUS. Sedangkan Subkontrak, kerjasama mitra yang sesuai dengan ruang lingkup dalam mendukung barang dan jasa sesuai tujuan tertentu.

3. Harmonisasi

Prinsip Harmonisasi yang mengharuskan negara pendonor melakukan upaya mobilisasi dalam pelaksanaan bantuan terhadap negara penerima sehingga tidak ada permasalahan dari kedua belah pihak. Di dalam prinsip harmonisasi, negara pendonor akan melakukan upaya peninjauan dan evaluasi program bantuan pembangunan. Sedangkan negara penerima bantuan memperkuat jalannya program kerja sama dengan adanya keterlibatan pimpinan instansi/lembaga pemerintah. Alhasil Negara pendonor dan negara penerima bantuan dapat menciptakan kesinambungan dan sesuai dengan kesepakatan dalam jalannya program bantuan.

Individual Arrangement (IA) antara USAID dan Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas menjelaskan pelaksanaan program bantuan “*The USAID*

Environment Portofolio” atau juga disebut dengan Portofolio Lingkungan Hidup USAID. Terdapat lima lingkup program bantuan yaitu 1) keanekaragaman hayati laut dan perikanan yang berkelanjutan, 2) keanekaragaman hayati darat, 3) energi bersih, 4) ketangguhan perubahan iklim dan bencana dan 5) air minum, sanitasi dan higienitas (Kementerian Sekretariat Negara, 2016).

Kelima dari lingkup program ini, USAID berpartisipasi dalam *Steering Committee* yang dipimpin oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan. Hubungan kelembagaan yang telah terkoordinasi dapat dikatakan berhasil dan diimplementasikan oleh pemerintah dan USAID. Hal ini sesuai seperti yang telah disepakati dalam *Individual Arrangement* Bappenas dan USAID tentang perjanjian bantuan “Portofolio Lingkungan Hidup USAID” dibawah ini :

Participate in annual Steering Committee Meetings co-chaired by the Ministry of Finance and BAPPENAS to discuss Projects and Activities under the USAID Environment Portofolio, monitor and evaluate the results of implementation, address problems if and as the rise, and reconfirm that the Projects and Activities undertaken remain high development priorities of both USAID and GoI.

Dari *Individual Arrangement* (IA) ini, terdapat lima tim teknis sesuai lingkup program USAID. Salah satunya yaitu Tim Teknisi Air, Sanitasi dan Kebersihan. Tim Teknisi ini berdasarkan *Technical Arrangement* (TA) antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Badan Pembangunan Internasional Amerika USAID. Didalam TA ini menjelaskan Pelaksanaan IUWASH PLUS selama tahun 2017-2021 tidak terlepas kesepakatan yang telah dicantumkan sehingga terjalin penguatan antara penerima bantuan dan pemberi bantuan. Koordinasi diantara Kementerian/Lembaga antara Ketua Tim Teknis dan anggotanya berjalan dengan baik. Dimana *Technical Arrangement* (TA) ini menetapkan Ketua Tim Teknisi atau disebut juga *Technical Counterpart Agency* (TCA) yaitu Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman Bappenas. Sedaan dan Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia. Sedangkan anggota tim teknis terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ketua Tim Teknisi akan mengadakan koordinasi dengan anggota tim teknis sedikitnya setiap enam bulan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2016) .

4. Pengelolaan Yang Berorientasi Pada Hasil Pembangunan

Prinsip ini mengarah pada implementasi yang mengharuskan semua pihak yang terlibat untuk memperhatikan dan mengutamakan hasil bantuan yang diberikan dengan tidak hanya penyaluran secara teknis namun juga turut mendefinisikan cara untuk melihat seberapa dampak yang diterima bantuan baik secara positif dan negatif. Prinsip ini, negara mitra dan negara penerima bantuan akan membuat kerangka laporan dan penilaian yang beroreintasi pada hasil pemantauan terhadap strategi yang telah disepakati. Semua pihak berpartisipasi dalam melihat perkembangan secara teknis maupun mekanisme program. Pengelolaan ini dapat mengetahui dampak positif maupun negatif yang dirasakan oleh penerima bantuan.

Setiap program IUWASH PLUS memiliki batas capaian keberhasilannya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sejak tahun 2017 hingga 2021, pencapaian program ini telah melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selama berjalannya pelaksanaan IUWASH PLUS, program ini telah berhasil menerapkan informasi dan data untuk menjangkau rumah tangga yang berpenghasilan rendah, memperluas jangkauan *Local Sustainability and Innovation Component* (LSIC) hingga mengembangkan program unggulannya yang memfokuskan pada pendekatan baru melalui media tradisional dan

digital (USAID, 2016). Pada awalnya telah ditentukan lebih dari 1.100.000 akan mendapatkan akses layanan air bersih, tetapi menurut laporan akhir dari program ini mencatat 1.634.980 yang telah diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan akses sanitasi yang aman telah ditargetkan 500.000 masyarakat mendapatkan sanitasi yang layak. Alhasil di tahun 2022 IUWASH PLUS mencatat 965.775 penduduk yang mendapatkan akses sanitasi aman, 367.445 masyarakat penduduk yang berpenghasilan rendah mendapatkan sanitasi yang layak. Program ini tidak hanya berfokus pada pelayanan akses air bersih dan sanitasi, tetapi pemangku kepentingan, mitra dan kelompok masyarakat dilatih dan pengembangan kesadaran pentingnya masalah air bersih dan sanitasi. Pelatihan ini mencapai 165.434 orang dalam rangka mendukung dan melaksanakan program WASH dan 125 kebijakan di 32 pemerintah daerah sebagai rencana kerja masyarakat hingga pengembangan proyek pembangunan keberlanjutan air bersih dan sanitasi. Seluruh jumlah pendanaan proyek selama tahun 2022 ditaksir sebesar USD 246,8 juta. IUWASH memiliki tim keuangan yang mempunyai tugas dalam memfasilitasi akses pembiayaan mulai dari skala individu hingga pemerintahan. Selama lima tahun, tim keuangan IUWASH PLUS bekerjasama dengan PDAM dalam membantu mitra swasta dan publik untuk membangun fasilitas air baru. Total nilai proyek yang ini sebesar USD 200.933.115 di tiga provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur dan Jawa Barat (DAI Global, 2021).

USAID IUWASH PLUS mengklasifikasikan lima daerah dalam melihat kemajuan program yang telah dilakukan. Beberapa program yang selesai seperti masyarakat mendapatkan sambungan PDAM baru dan layanan sanitasi bersama. Penerimaan program ini diimplementasikan di wilayah rumah tangga kategori *hotspot* dan rumah tangga B40. Berikut pencapaian dari program IUWASH PLUS di beberapa daerah di Indonesia (DAI Global, 2021):

Daerah Pertama Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pengembangan pasokan air di tiga daerah yaitu Kota Medan, Kabupaten Binjai dan Deli Serdang dengan menysasar 88.000 rumah tangga. Pencapaian yang paling tertinggi proyek IUWASH PLUS di Provinsi Sumatera Utara yaitu masyarakat mendapatkan pelayanan air bersih dengan sambungan baru oleh PDAM sebanyak 196.145 rumah tangga dan masyarakat kategori B40 sebanyak 79.260. Kedua, akses layanan sanitasi yang aman sebanyak 98.455 dan masyarakat kategori B40 sebanyak 33.855.

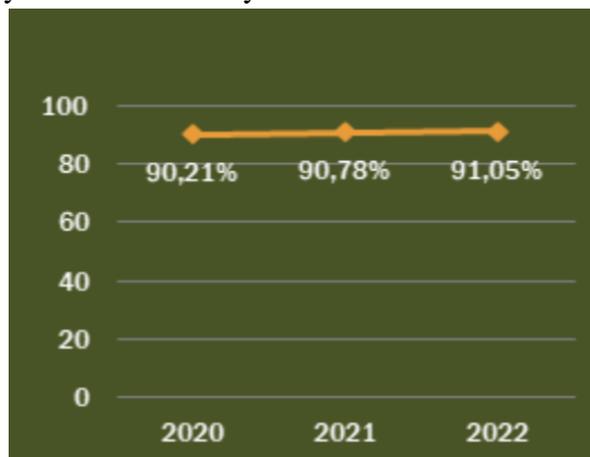
Daerah yang kedua yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta dan Tangerang (WDJT) dengan sasaran tujuh kota dan kabupaten meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Karawang, DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. USAID IUWASH PLUS mencatat bahwa 677.425 mendapatkan akses layanan air bersih oleh PDAM dan 153.295 masyarakat B40. Sedangkan layanan sanitasi yang aman sebanyak 215.015 dan 99.765 masyarakat B40.

Daerah ketiga yaitu Provinsi Jawa Tengah, memiliki 34,7 juta penduduk dan 1,7 juta orang tidak mempunyai akses sanitasi yang aman. USAID IUWASH PLUS telah bekerja sama dengan tujuh pemerintah kota dan kabupaten yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kabupaten Wonosobo. 213.385 masyarakat di Jawa Tengah mendapatkan layanan air yang lebih baik dari PDAM dan 105.476 masyarakat B40. Layanan penyedotan sanitasi terus diperluas yang kini telah beroperasi di empat daerah yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kota Salatiga dan Kota Magelang. Masyarakat dari rumah tangga B40 juga mendapatkan akses layanan sanitasi sebanyak 86.555.

Daerah keempat yaitu Jawa Timur dengan menysasar delapan kota dan kabupaten yaitu Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Sebanyak

433.195 masyarakat mendapatkan air bersih dan sambungan pipa baru dari PDAM dan masyarakat B40 sebanyak 105.245. Pelayanan penyedotan sanitasi juga dikembangkan di 6 kota dan kabupaten yaitu kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kota/Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang.

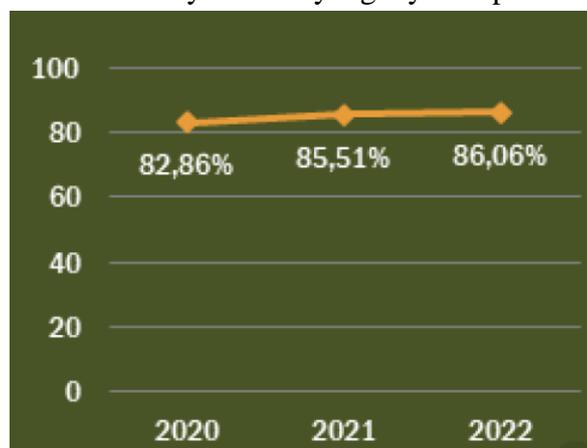
Daerah kelima yaitu Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur (SSEI), terdiri dari Kota Makassar, Kota Ternate, Kota Jayapura, Kabupaten Barru, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Maluku tengah, dan Kabupaten Jayapura. Sebanyak 48 lokasi *Hotspot* dan 660 rumah tangga mendapatkan akses air bersih sedangkan akses sanitasi dasar sebanyak 967. Pencapaian yang paling penting di wilayah SSEI ini yaitu pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Mamminasata di Kota Makassar. Sebanyak 196.440 masyarakat telah mendapatkan akses layanan sanitasi yang aman dan masyarakat B40 sebanyak 84.785 di wilayah SSEI.



Gambar 2. Grafik Akses Air Minum Layak Tahun 2021

(Sumber : Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2022)

Berdasarkan gambar di atas pencapaian strategi pembangunan air minum yang layak turut di survei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui indikator perumahan dan kesehatan lingkungan 2022. Persentase air minum yang layak di perkotaan dan pedesaan terus meningkat tiap tahunnya. Meskipun peningkatan ini tidak spesifik, tetapi bisa memenuhi target SDGs dalam keamanan air dan sanitasi. Selain itu, rumah tangga yang memiliki air yang aman dan layak dapat digunakan untuk menjadi indikator pencapaian secara menyeluruh dan target SDGS tahun 2030. Tren peningkatan ini turut dibantu oleh PDAM untuk menyediakan akses layanan air yang layak kepada masyarakat.



Gambar 3. Grafik Fasilitas BAB Sendiri Tahun 2021

(Sumber : Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2022)

Sedangkan sanitasi berdasarkan gambar diatas, fasilitas BAB di Indonesia mengalami peningkatan 85,51%. Trend peningkatan ini pada tahun 2020-2022, dengan kriteria tempat BAB yang digunakan sendiri. Di tahun 2021, Kementerian Kesehatan Indonesia melaksanakan Penganugerahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Bekerlanjutan (STBM) (Badan Pusat Statistik, 2022). Penganugerahan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mencapai target SDGs dan RPJMN pemerintah Indonesia. Terdapat empat pulau yang telah mencapai sanitasi yang layak di tahun 2021, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi dan Bali (POKJA PPAS, 2021).

5. Pertanggungjawaban bersama

Prinsip pertanggungjawaban bersama yang mewajibkan pendonor dan negara penerima dapat membuat pertanggungjawaban dalam pelaksanaan hingga implementasi bantuan tersebut. Semua dilakukan secara transparan dan melibatkan semua pihak sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas perkembangan program bantuan. Selama berjalannya program, Laporan kerjasama USAID dengan Bappenas dalam program IUWASH PLUS diterbitkan setiap empat kali dalam setahun yang berbentuk “*Quarterly Progress Report*” dari tahun 2017-2021 hingga pada akhirnya ketika program kerjasama telah selesai, kemudian dirilis “*Final Report*” pada bulan Februari 2022 sebagai bentuk bagian laporan pertanggungjawaban bantuan dari USAID IUWASH PLUS.

Laporan USAID mulai disusun dari awal pelaksanaan program IUWASH PLUS di Indonesia. Laporan ini menunjukkan tersalurkannya fasilitas USAID dalam mencapai penguatan bersama instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kelompok lokal. Melalui fasilitas ini diharapkan agar program dapat berjalan secara optimal berkelanjutan serta bermanfaat bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori membutuhkan bantuan ini. Laporan IUWASH PLUS juga mencakup capaian program yang telah dilakukan oleh *Local Sustainability and Innovation Component* (LSIC). Program ini menunjukkan data dan informasi mencakup lingkungan masyarakat yaitu pendekatan melalui media tradisional dan digital. LSIC membuat sebuah laporan sesuai standar yang dimiliki oleh USAID dan dimana laporan tersebut dilihat oleh pihak lokal yang menerima bantuan tersebut. Laporan ini juga menjadi keperluan dalam evaluasi program yang telah di rencanakan dan sebuah hasil yang telah disalurkan bantuan tersebut.

Kesimpulan

Bantuan luar negeri saat ini telah merujuk pada percepatan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). *United State Agency for International Development* (USAID) merupakan Lembaga bantuan luar negeri yang turut membantu negara berkembang dalam mengatasi masalah ekonomi dan program bantuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu program tersebut yaitu air dan sanitasi yang peran penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Indonesia adalah salah satu negara yang mendapatkan bantuan pembangunan berkelanjutan USAID dalam bidang air dan sanitasi. USAID IUWASH PLUS merupakan program bantuan pembangunan air, sanitasi dan hygiene kepada Indonesia. Program bantuan ini di tandai dengan adanya *Individual Arrangement* (IA) antara USAID dan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, sedangkan dokumen pengaturan teknis atau *Technical Arrangement* (TA) ditandatangani oleh USAID dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tentang air, sanitasi dan hygiene.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merupakan organisasi internasional yang ikut dalam menginisiasi *Paris Declaration on Aid Effectiveness* Tahun 2005. *Paris Declaration* merupakan awal dari kesadaran negara penerima bantuan luar negeri untuk lebih memperhatikan dan memantau aliran bantuan

luar negeri. Sehingga dikemukakan lima prinsip *Aid Effectiveness* yaitu *Policy Ownership*, *Local Alignment*, *Harmonization*, *Managing for Results* dan *Mutual Accountability*. Berdasarkan prinsip efektivitas *Paris Declaration on Aid Effectiveness* dalam program IUWASH PLUS, penulis menemukan prinsip *Policy Ownership* yaitu Indonesia menetapkan kebijakannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN). Didalam RPJMN 2020-2024, air dan sanitasi merupakan proyek prioritas strategis. Strategi kebijakan air dan sanitasi sebagai bentuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) no. 6. Prinsip *Local Alignment* dapat dilihat antara IUWASH PLUS besama-sama membantu instansi pemerintah Indonesia maupun 35 pemerintah daerah (Pemda). Prinsip *Harmonization*, terdapat evaluasi dan koordinasi antara USAID dan Bappenas. Evaluasi dan koordinasi tersebut diadakan setidaknya satu kali setiap enam bulan bersama anggota tim teknis yaitu Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan. Melihat pada prinsip *Managing for Results*, dengan ini dapat disimpulkan bahwa program IUWASH PLUS mulai tahun 2017 hingga 2021 telah mencapai target yang telah ditentukan di setiap programnya atau dapat dikatakan sangat efektif. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai macam mitra dan program lokal sehingga bisa meningkatkan pembangunan berkelanjutan air dan sanitasi. Prinsip *Mutual Accountability*, IUWASH PLUS melaporkan kegiatan dan pelaksanaannya melalui “*Quarterly Progress Report*”. Laporan ini diterbitkan melalui web resmi dari IUWASH PLUS selama 2017 hingga 2021. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa program USAID IUWASH PLUS efektif dalam meningkatkan layanan air dan sanitasi di Indonesia merujuk pada hasil yang dipublikasikan oleh USAID (*United Nations Agency for International Development*) melalui *Final Report* bulan Februari 2022.

Daftar Pustaka

- Asongu, S. A. (2015). Reinventing Foreign Aid for Inclusive and Sustainable Development: A Survey. *SSRN Electronic Journal*, (September 2014).
- Badan Pusat Statistik. (2022). Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan. In M. S. Ida Eridawaty Harahap, S.Si., M. S. Amalia Noviani, S.S.T., M. E. K. K. Eva Yugiana, S.S.T., S. S. T. Hanin Rahma Septina, & S. E. Hardianto, S.S.T. (Eds.), *Badan Pusat Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Beritapers. (2021). 5 Tahun USAID IUWASH PLUS. Retrieved February 14, 2023, from beritapers.id website: <https://beritapers.id/2021/09/03/lima-tahun-perjalanan-usaid-iuwash-plus-mendukung-pencanangan-target-bebas-buang-air-besar-sembarangan-babs-di-tahun-2025-menuju-kabupaten-tangerang-gemilang/>
- DAI Global, L. (2021). *USAID IUWASH PLUS: Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan untuk Semua : Final report*.
- Haak, E., & Nakamura, N. (2021). Perceptions of local community members towards foreign aid: A case study of Vava’u, Tonga. *New Zealand Geographer*, 77(1), 32
- Indonesia, U., & Water, U. (2017). *Penyehatan Lingkungan Untuk Semua (Iuwash Plus) Project Year 2 Work Plan*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2016). TECHNICAL ARRANGEMENT antara KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /BAPPENAS dan BADAN PEMBANGUNAN INTERNASIONAL AMERIKA SERIKAT (USAID). Retrieved October 19, 2022, from Kementerian Sekretariat Negara website: https://ktln.setneg.go.id/simpuu/file/BILATERAL/AMERIKA/DOKUMEN/PROYEK/14.WATER,SANITATIONANDHYGIENEPROGRAM_Bappenas.pdf

- Kementerian Sekretariat Negara. (2016). Individual Arrangement antara Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Retrieved October 20, 2022, from Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri website: <https://ktln.setneg.go.id/simpu/file/BILATERAL/AMERIKA/DOKUMEN PROYEK/8.IA Environment.pdf>
- Klasing, A. (2020). Take Action to Keep Water On in the US. Retrieved October 22, 2022, from Human Rights Watch website: <https://www.hrw.org/news/2020/06/25/take-action-keep-water-us>
- NAWASIS. (2017). NAWASIS – National Water and Sanitation Information Services. Retrieved July 5, 2022, from <http://nawasis.org/portal/mitra/usaid-iuwash-plus/13>
- OECD. (2005). The Paris Declaration on Aid Effectiveness : Five Principles for Smart Aid. *OECD*. Retrieved from <http://www.oecd.org/dac/effectiveness/45827300.pdf>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2005). *Paris Declaration on Aid Effectiveness* (pp. 1–12). pp. 1–12.
- Peraturan Presiden RI. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (No. 59 Tahun 2017 Pasal 9 Ayat 2 Tahun)*. Jakarta.
- POKJA PPAS. (2021). Capaian Akses Sanitasi Layak 2021. Retrieved February 14, 2023, from NAWASIS website: <https://www.nawasis.org/portal/galeri/read/capaian-akses-sanitasi-layak-2021/52471>
- Sandy, O. ferry. (2020). Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(3), 415–422.
- Serniati, E. I., Parawangi, A., & Ma'ruf, A. (2021). Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi. *Journal Unismuh Makassar*, 2(3), 14.
- Suryani, A. S. (2020). Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi saat Pandemi Covid-19. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 199–214. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1757>
- U.S. Governmet. (2017). Global Water Strategy 2017. Retrieved June 15, 2022, from U.S Government Global Water Strategy website: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Global_Water_Strategy_2017_final_508v2.pdf
- USAID. (2009). *USAID: USAID History*. Retrieved from http://www.usaid.gov/about_usaid/usaidhist.html
- USAID. (2016). Local Sustainability and Innovation Component (LSIC). Retrieved October 30, 2022, from <https://www.iuwastangguh.or.id/local-sustainability-and-innovation-component-lsic?lang=en>
- USAID. (2018). Local Sustainability And Innovation Component Implementation Guidelines & Plan. Retrieved from https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00TSNN.pdf
- USAID. (2022). History. Retrieved August 5, 2022, from <https://www.usaid.gov/indonesia/history>
- Utoro, L. C. (2017). Motivasi Bantuan Luar Negeri Australia untuk Nauru Tahun 2009 - 2015 (Universitas Katolik Parahyangan). Universitas Katolik Parahyangan. Retrieved from <http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2025/Cover - Bab 1 - 3111061sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- WHO. (2017). Diarrhoeal disease. Retrieved October 22, 2022, from World Health Organization website: <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease>

Zahidi, M. S., Saiman, Pradana, H. A., Kurniawati, D. E., Sulistyowati, T., Yumitro, G., ... Amiruddin, Z. (2016). Mozaik Kebijakan Sosial Politik Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN. In W. Hardyanti & Nurudin (Eds.), *Pusat Kajian Sosial Politik, FISIP Universitas Muhammadiyah Malang*. Malang: Pusat Kajian Sosial Politik. Retrieved from <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0034408630580209>